

BAB V

PEMBAHASAN

A. Pendidikan Politik Bagi Masyarakat Oleh Partai Kebangkitan Bangsa Di Kabupaten Trenggalek

Pendidikan politik bukan hanya penggabungan dari kata pendidikan dan politik, makna dari pendidikan politik sangat luas. Pendidikan politik didefinisikan sebagai pendidikan orang dewasa, yang diarahkan untuk membina kemampuan seorang individu untuk mengaktualisasikan dirinya sebagai pribadi yang bebas dan mengembangkan kedudukannya sebagai warga negara.¹¹⁷ Kartini Kartono juga menyebutkan bahwa, pendidikan politik merupakan pendidikan orang dewasa dengan menyiapkan kader-kader untuk pertarungan politik dan mendapatkan penyelesaian politik, agar menang dalam perjuangan politik.¹¹⁸

Pendidikan politik bagi masyarakat oleh Partai Kebangkitan Bangsa merupakan sebuah keharusan, sebab dengan pendidikan politiklah Partai Kebangkitan Bangsa bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat dalam meningkatkan sumberdaya manusia. Demokrasi tanpa diimbangi dengan sumberdaya manusia yang tinggi berpotensi menimbulkan kecurangan-kecurangan besar. Warga akan mudah diombang-ambing demi kepentingan golongan tertentu, bahkan tidak bisa dipungkiri oknum PKB atau oknum partai lain pun bisa juga melakukan kecurangan yang sangat fatal apabila

¹¹⁷ Eko Handoyo dan Puji Lestari, *Pendidikan Politik*, (Yogyakarta: Pohon Cahaya, 2017), hal. 9.

¹¹⁸ Kartini Kartono, *Pendidikan Politik: Sebagai Bagian Pendidikan Orang Dewasa*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), hal. 12.

melihat kesempatan dan didukung oleh warga sendiri. Seperti halnya yang selama ini terjadi, kegiatan money politik hampir menjadi hal yang sangat wajar dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia, baik tingkat paling rendah sampai tingkat yang paling tinggi sekalipun.

Hal tersebut lantaran warga banyak yang senang dan menudukung kegiatan money politik, bahkan sering terdengar dari masyarakat bahwa dirinya akan memilih dari calon yang ada duit atau uangnya. Mendengar seringnya warga mengatakan hal itu, akhirnya banyak calon atau politisi yang memanfaatkan hal tersebut untuk melakukan black campaign atau kampanye gelap demi mendapat suara banyak yang memenangkan dirinya dalam ajang pertarungan politik.

Timbulnya pemikiran seperti itu dari warga tidak terlepas dari kurangnya kesadaran politik, warga banyak yang belum mengerti jika uang yang diterimanya tadi merupakan bagian dari money politik, atau sebuah pelanggaran. Selain itu, warga juga belum menyadari jika *money* politik akan berdampak besar dalam pemerintahan kedepan, sebab berdasarkan teory ekonomi siapapun yang mengeluarkan modal besar akan berfikir keras untuk dapat untung besar atau setidaknya untuk mengembalikan modal.

Hal itulah yang sering terjadi diberbagai daerah di Indonesia sehingga banyak sekali kegiatan pembangunan tidak berjalan maksimal, sebab anggaran yang ada sering di sunat oleh pemangku kebijakan demi mengembalikan ongkos demokrasi yang telah dikeluarkan. Maka tak sedikit politisi atau pemangku kebijakan terkena masalah korupsi besar-besaran. Tidak hanya itu dibeberapa kasus politisi atau pemangku kebijakan juga

tersandung masalah jual beli jabatan dan sejumlah kasus lainnya akibat berawal dari ongkos politik yang mahal karena melakukan money politik.

Politik memang bukan kegiatan perekonomian atau jual beli yang menguntungkan. Politik sering didefinisikan sebagai sebuah bentuk pengabdian kepada negara agar tanah air tercinta menjadi lebih baik. Selain berpolitik sering juga diartikan sebagai bentuk perjuangan dari dalam pemerintahan. Sedangkan jika ada keinginan membenahi negara namun tidak berpolitik berarti dirinya melakukan pembenahan negara dari luar.

Namun yang perlu diingat, siapapun orangnya dan sebegus apapun tujuannya jika tidak diimbangi dengan sistem yang baik maka semua itu akan sulit terwujud, bahkan tidak sedikit yang malah tersandung pelanggaran-pelanggaran hukum sehingga tujuannya yang baik tadi menjadi sia-sia. Sedangkan salah satu cara untuk membenahi sistem bisa dilakukan dengan pendidikan politik agar semua orang memiliki kesadaran yang baik dalam berdemokrasi dan dapat mempertimbangkan hal-hal yang mudorot atau yang maslahat untuk kepentingan orang banyak.

Oleh sebab itu, dalam mengatasi atau meminimalisir hal-hal tersebut perlu sekali dilakukan pendidikan politik bagi masyarakat dengan sangat gencar-gencaran, seperti halnya dijelaskan diatas jika pendidikan politik salah satunya diarahkan untuk membina kemampuan seorang individu untuk mengaktualisasikan dirinya sebagai pribadi yang bebas dan mengembangkan kedudukannya sebagai warga negara.

Berdasarkan keterangan dari ketua PKB Kabupaten Trenggalek bapak Kholiq, S.H., M.Si mengatakan jika PKB trenggalek konsisten melakukan

pendidikan politik bagi masyarakat di kabupaten Trenggalek, bahkan dana bantuan politik (banpol) selalu dianggarkan lebih dari 60 persen untuk menunjang kegiatan politik. Pendidikan politik bagi masyarakat yang dilakukan PKB Kabupaten trenggalek sering dilaksanakan bersama dengan organisasi masyarakat Nahdlatul Ulama dalam bentuk pengajian atau di hari-hari tertentu mengundang sejumlah pihak datang ke kantor PKB trenggalek dalam melaksanakan kegiatan pendidikan politik.

Sedangkan menurut Wakil sekretaris PKB Trenggalek Bapak Murkam, S.T. PKB Trenggelak juga sering memberikan pendidikan bagi masyarakat dikalangan anak muda, sebab anak muda merupakan iron stok atau generasi penerus yang harus sadar mengenai politik agar kedepannya demokrasi di Indonesia atau di Trenggalek khususnya menjadi lebih baik. Kecurangan-kecurangan yang selama ini masih terus terjadi dan seperti lumrah dilaksanakan dalam setiap momen pemilu atau pilkada, beberapa tahun kedepan harapannya bisa hilang.

Pendidikan politik bagi masyarakat selain untuk memberikan kesadaran juga dapat menjadi ajang PKB lebih dekat lagi dengan warga, sebab modal besar partai politik adalah memiliki kedekatan dengan masyarakat sehingga tanpa melakukan *black campaign* parpol sudah mendapat dukungan besar dari warga. Seperti diketahui tanpa dukungan dari warga parpol tidaklah memiliki kekuatan apa-apa. Disisi lain dengan pendekatan politik juga warga akan lebih mudah jika mengalami kebingungan dalam hal politik terutama dalam menyampaikan aspirasi yang selama ini menjadi keluhan kesah di daerahnya masing-masing.

Agenda-agenda pendidikan politik yang dilakukan oleh Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Trenggalek kepada masyarakat Kabupaten Trenggalek dilakukan agar meningkatkan kesadaran dan juga partisipasi politik masyarakat Kabupaten Trenggalek. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat Kabupaten Trenggalek terhadap politik maka akan menciptakan kedewasaan masyarakat Kabupaten Trenggalek dalam berpolitik sehingga tercipta kestabilan politik di Kabupaten Trenggalek itu sendiri.

B. Kegiatan Pendidikan Politik Bagi Masyarakat Oleh Partai Kebangkitan Bangsa Di Kabupaten Trenggalek Menurut Undang-Undang No. 02 Tahun 2011

Partai yang baik merupakan partai yang berperan sebagai edukator untuk masyarakat dan juga kader partainya. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Trenggalek sebagai partai politik yang baik selalu melaksanakan fungsinya yaitu memberikan pendidikan politik untuk kader dan masyarakat.

Hal ini dibuktikan melalui kegiatan pendidikan yang telah direalisasikan oleh Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Trenggalek, diantaranya yaitu kegiatan pendidikan politik dengan tema peran partai dalam membentuk jiwa leadership kader muda, kegiatan pendidikan politik dengan tema pendidikan politik kader penggerak desa, kegiatan pendidikan politik dengan tema kader muda sebagai penggerak desa, kegiatan pendidikan politik dengan tema kerja dan karya nyata menuju kemenangan.

Giesscke seorang ahli didaktik, pendidik dan politikus Jerman, mendefinisikan pendidikan politik sebagai:

1. Bildungswissen yang artinya yaitu, bisa mengetahui bentuk dan gambaran dari manusia (mensbeeld) serta perkembangannya, dan gambaran kebudayaan bangsa sendiri, sehingga orang sadar akan identitas sendiri, memiliki kepercayaan sendiri yang kuat dan sanggup menghapus kompleks rasa rendah diri serta rasa dependensi pada kekuatan atau bangsa lain, dan memahami benar kekuatan bangsa sendiri, pandangan hidup dan filsafat hidup bangsa (dalam hal ini Pancasila) yang dipakai sebagai patokan perjuangan untuk mencapai sasaran hidup berbangsa, yaitu hidup sejahtera;
2. Orientierungswissen yaitu mampu berorientasi pada paham-paham kemanusiaan yang bisa memberikan kebahagiaan, keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan pada setiap warga negara dan umat manusia. Secara obyektif orang harus berani melihat realitas nyata, dan mau mengadakan orientasi ulang terhadap situasi kondisi politik yang belum mantap, khususnya mengoreksi kelemahan noda dan unsur destruktif lainnya. Sehingga bisa ditemukan alternatif penyelesaian yang baik, dan orang bisa keluar dari macammacam jalan buntu/impasse, menuju keseimbangan dan keserasian hidup bersama;
3. Verhaltungswissen yaitu menunjuk pada perilaku yaitu memahami hukum, norma, tata tertib, dan peraturan yang menuntun semua tingkah laku politik. Sehingga subyek menjadi lebih cermat dan lebih bijaksana menanggapi situasi politik sesaat. Caranya ialah dengan jalan mampu

mengendalikan tingkah laku diri sendiri atas pertimbangan hati nurani sehingga orang menjadi tidak salah tingkah dan tidak egoistis-egosentris, dan mau menjunjung tinggi prinsip kesusilaan;

4. Aktionwissen artinya mampu bertingkah laku tepat, cermat, dan benar, karena didukung oleh prinsip kebenaran dan keadilan, disertai refleksi objektif, dan wawasan kritis. Prinsip kebenaran dan keadilan harus bersifat universal. Refleksi mengandung kesanggupan mempertimbangkan baik-baik, dan mampu melakukan pencerminan kembali peristiwa-peristiwa politik, hingga terjadi pewawasan reflektif, serta membuahakan ide-ide dan aksi/tindakan yang tepat untuk mengatasi semua kesulitan¹¹⁹

Hal ini sesuai dengan definisi pendidikan politik yang dikemukakan oleh R. Hajer, ia mendefinisikan pendidikan politik adalah usaha membentuk manusia untuk menjadi partisipan yang bertanggung jawab dalam politik.¹²⁰ Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 yang menjadi perubahan atas Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Salah satu fungsi partai politik di Indonesia adalah memberikan pendidikan politik bagi setiap warga negara.¹²¹

M. Nur Khoiron menjelaskan fungsi pendidikan politik sebagai political forming dan political bildung. Makna forming sendiri, pendidikan politik terdapat kandungan berisi intensitas dalam pembentukkan insan politik yang sadar atas status politiknya di dalam kedudukannya sebagai

¹¹⁹ *Ibid.*, hal. 30

¹²⁰ Kartini Kartono, *Pendidikan Politik: Sebagai Bagian Pendidikan Orang Dewasa*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), hal. 32

¹²¹ Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

warga negara yang baik. Bildung mempunyai makna, pendidikan politik merupakan pendidikan diri sendiri, menyangkut aktivitas membentuk diri sendiri dengan kesadaran tanggung jawab menjadi insan politik.¹²²

Agenda pendidikan politik yang dilakukan oleh Partai Kebangkitan Bangsa tersebut selaras dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 yang menjadi perubahan atas Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Salah satu fungsi partai politik di Indonesia adalah memberikan pendidikan politik bagi setiap warga negara.¹²³

Sedangkan tujuan akhir kegiatan pendidikan yang telah direalisasikan oleh Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Trenggalek adalah mempersiapkan kader-kader terbaik PKB untuk negeri ini, meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Melalui pendidikan politik diharapkan pula adanya perubahan sikap, yaitu dari apatisme dan kepasifan, beralih menjadi sikap aktif, penuh inisiatif, maju dan demokratis. Setiap warga negara seharusnya turut membangun masyarakat dan negaranya, yang dilakukan bersama dengan pemerintah. Juga aktif dalam usaha mendinamisir dan merenovasi lembaga masyarakat, dan sistem politiknya. Hal ini sangat perlu untuk melawan sisa-sisa birokratisasi yang terlalu ketat/over birokratisasi, teknokrasi otoriter, dan tirani personal dari penguasa. Disamping itu pendidikan politik bisa memberi sumbangan bagi proses demokrasi yang lebih maju dari segenap

¹²² Eko Handoyo dan Puji Lestari, *Pendidikan Politik*, (Yogyakarta: Pohon Cahaya, 2017), hal. 11.

¹²³ Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

lapisan masyarakat, dengan menggunakan prinsip-prinsip yang realistis dan manusiawi. Melalui pendidikan politik diharapkan pula adanya perubahan sikap, yaitu dari apatisisme dan kepasifan, beralih menjadi sikap aktif, penuh inisiatif, maju dan demokratis. Setiap warga negara seharusnya turut membangun masyarakat dan negaranya, yang dilakukan bersama dengan pemerintah. Juga aktif dalam usaha mendinamisir dan merenovasi lembaga masyarakat, dan sistem politiknya. Hal ini sangat perlu untuk melawan sisa-sisa birokratisasi yang terlalu ketat/over birokratisasi, teknokrasi otoriter, dan tirani personal dari penguasa. Disamping itu pendidikan politik bisa memberi sumbangan bagi proses demokrasi yang lebih maju dari segenap lapisan masyarakat, dengan menggunakan prinsip-prinsip yang realistis dan manusiawi.

Hal ini sesuai dengan yang diamanatkan pada Bab XIII tentang Pendidikan Politik Pasal 31 ayat (1) yang berbunyi “partai politik melakukan pendidikan politik bagi masyarakat sesuai ruang lingkup tanggung jawabnya dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender.”¹²⁴

Hal ini diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Pasal 31 tentang Partai Politik, dijelaskan tentang tujuan pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik:¹²⁵

1. Meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

¹²⁴ Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Pasal 31 ayat (1) tentang Partai Politik.

¹²⁵ *Ibid.*

2. Meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
3. Meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

Hal ini juga sesuai dengan Undang-undang No 02 tahun 2011 tentang partai politik perubahan atas undang-undang Nomor 2 Tahun 2008, pada Pasal 29 ayat (1) huruf c dan huruf d serta ayat (2) diubah, dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), dimana partai politik melakukan rekrutmen terhadap warga negara Indonesia untuk menjadi: anggota Partai Politik; bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah; dan bakal calon Presiden dan Wakil Presiden.

Artinya, apa yang di lakukan oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPW Trenggalek telah sesuai dengan apa yang di tuangkan dalam Undang-Undang no 2 tahun 2011 Pasal 29 (1) tentang partai politik perubahan atas undang-undang Nomor 2 Tahun 2008, bahwa partai politik melakukan rekrutmen terhadap warga negara Indonesia, dengan mengusung kader muda sebagai poros penggerak dan menjadikanya generasi penerus untuk menuju kursi-kursi pemerintahan yang bertujuan menjadikan Indonesia lebih maju.

Berdasarkan undang-undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik, bahwa dana bantuan yang diperoleh parpol sedikitnya 60 persen harus dialokasikan dalam menyelenggarakan pendidikan politik. Namun konteks pendidikan politik yang dimaksud tidak hanya untuk melakukan

pendidikan politik bagi masyarakat, bisa juga digunakan melakukan pendidikan politik untuk kader-kadernya agar lebih militan dan tidak melakukan kegiatan-kegiatan politik yang menyalahi peraturan perundang-undangan.

Selain itu juga untuk menyadarkan kader bahwa dalam berpolitik harus dilakukan dengan penuh tanggungjawab dan mementingkan kepentingan umum dan mau melakukan pendekatan dengan warga agar mengerti apa yang menjadi keinginan warga. Sebab banyak politisi yang tidak bisa menjalin kedekatan dengan warga dan tidak mau memahami apa yang diinginkan warga sehingga antara masyarakat dan politisi terjadi *gap* yang sangat jauh. Untuk itu PKB Trenggalek menginginkan kader-kadernya terus berbaur dengan masyarakat dan memperjuangkan kepentingan-kepentingan masyarakat bawah tanpa ada jarak yang sangat jauh.

Sehingga siapapun orangnya dari kalangan apapun bisa datang berdiskusi mengenai masalah-masalah yang ada di Kabupaten Trenggalek dan mencari solusinya bersama-sama tanpa merasa takut, minder malu dan sebagainya apabila kesadaran warga dan kader-kader PKB Trenggalek sudah terbangun dengan baik. Menurut bapak Amin Tohari, M.Pd selaku anggota DPRD Kabupaten Trenggalek dari fraksi PKB mengatakan bahwa kader PKB selalu ditanamkan untuk menjalin kedekatan dengan warga, siapapun yang membutuhkannya harus bisa meluangkan waktu, jangan sampai kader PKB jauh dari warga, sebab dengan menjalin kedekatan itulah maka pendidikan politik yang baik bisa ditanamkan dengan secara perlahan.

Berdasarkan agenda-agenda pendidikan politik yang dilakukan oleh Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Trenggalek pendidikan politik yang dilakukan oleh Partai Kebangkitan Bangsa tersebut sudah sesuai dengan pasal 31 ayat (2) undang-undang nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik yang menjelaskan bahwa pendidikan politik dilaksanakan untuk membangun etika dan budaya politik yang sesuai Pancasila.¹²⁶ Kesesuaian tersebut dapat dibuktikan dengan tujuan agenda pendidikan politik yang dilakukan Partai Kebangkitan Bangsa di Kabupaten Trenggalek yaitu menanamkan pemahaman politik kepada masyarakat. Tujuan tersebut tentu selaras dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

C. Kegiatan Pendidikan Politik Bagi Masyarakat oleh Partai Kebangkitan Bangsa di Kabupaten Trenggalek dalam Perspektif *Fiqih Siyasah*

Salah satu tugas dari partai politik adalah melakukan kegiatan pendidikan politik agar masyarakat sadar dan tahu mengenai pentingnya politik. Firmanzah dalam bukunya menjelaskan bahwa fungsi dari partai politik itu ada dua, yaitu fungsi internal dan eksternal.¹²⁷ Dan kegiatan pendidikan politik merupakan wujud dari fungsi internal dimana tugas partai politik adalah memberikan pembinaan, edukasi, pembekalan, kaderisasi juga melanggengkan ideologi politik partai.

Sedangkan Politik secara etimologi dalam bahasa Arab disebut *as-siyasah* yang berarti mengelola, mengatur, memerintah dan melarang

¹²⁶ Pasal 31 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik

¹²⁷ Firmanzah, *Mengelola Partai Politik: Komunikasi Dan Positioning Ideologi Politik Di Era Demokrasi*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2008), hal.70.

sesuatu. Atau secara definisi berarti prinsip-prinsip dan seni mengelola persoalan publik.¹²⁸ Selain itu, kata siyasah, juga diartikan sebagai satu bentuk aktivitas yang mengacu perbaikan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa siyasah secara terminologi adalah satu bentuk interaksi yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan untuk mengatur stabilitas sosial politik ke arah yang lebih baik.¹²⁹

Salah satu cara untuk mengatur politik yang lebih baik adalah memberikan kesadaran kepada masyarakat dan juga kepada politisi agar mengerti hal-hal yang dilarang dalam Islam maupun dalam peraturan perundangan-undangan sekaligus dijelaskan mengenai dampak-dampak yang akan terjadi jika pelanggaran itu dilakukan. Seperti halnya yang dijelaskan diatas mengenai money politik yang selalu dilakukan para politisi dan diterima dengan baik oleh warga sehingga keduanya sama-sama bersengkongkol melakukan kesalahan. Padahal hal tersebut memiliki dampak yang besar dan merugikan orang banyak.

Pandangan Islam terhadap politik dapat dimaknai sebagai sistem hukum yang diberlakukan untuk mengatur stabilitas negara serta membangun kesejahteraan rakyat dengan satu konsekuensi bahwa setiap kebijakan mesti dilakukan secara paradigmatis sehingga tidak kontroversi dengan nilai moralitas agama. Untuk itu ulama Islam telah melakukan klasifikasi dari suatu aktivitas politik ke dalam beberapa variabel. Pertama,

¹²⁸ Muhammad Elvandi, *Inilah Politikku*, (Solo; PT. Era Adicitra Intermedia, 2011), hal. 43.

¹²⁹ Lukman Arake, *Islam Dan Konseptualisasi Politik Kaum Minoritas*, (Cet.1; Yogyakarta: Prudent Media, 2012), hal 3

perilaku politik yang mengarah pada perbaikan secara menyeluruh dalam sebuah komunitas masyarakat dengan tujuan menciptakan kesetaraan dalam semua aspek kehidupan sehingga pada akhirnya mereka lebih merasakan ketenangan dan kenyamanan dalam setiap interaksi yang dilakukannya.¹³⁰ Sistem politik semacam ini dijuridis sebagai implementasi dari nilai-nilai moralitas serta prinsip-prinsip sakral. Perilaku politik seperti inilah yang kemudian disebut dengan *siyasah syar'iah* dalam literature Islam.

Kedua, adalah satu bentuk perilaku politik yang mengarah pada kepentingan pribadi semata dan tidak menghiraukan kepentingan masyarakat, sehingga persoalan-persoalan yang mencuat ditengah-tengah mereka tidak mendapat perhatian serius. Maka dari itu perilaku politik semacam ini dianggap sebagai bagian dari pelaku yang mengarah pada ketidakadilan dan hanya untuk meligitimasi kekuasaan sehingga dalam konteks Islam dikategorikan sebagai *siyaasah zalimah* karena tidak menciptakan kenyamanan dalam memerintah.¹³¹ Dalam pandangan Islam, setiap aktivitas politik hendaknya terbangun atas dasar moral dan nilai esensi agama seperti kejujuran, keadilan, amanah dan sebagainya. Namun demikian tidak berarti bahwa setiap kebijakan politik yang kemudian dapat dilegitimasi sebagai tindakan yang bijak harus terimplementasi dari setiap masalah yang telah dijelaskan secara detail dan transparan oleh teks-teks agama, karena setiap perilaku politik dapat saja dianggap sebagai tindakan yang benar selama hal tersebut sejalan dengan nilai-nilai moralitas agama

¹³⁰ *Ibid.*, hal. 4

¹³¹ *Ibid.*, hal. 5

itu sendiri. Itulah sebabnya Ibnu Akil seorang tokoh ulama klasik pernah menolak pernyataan Imam Syafi'i bahwa:

Suatu kebijakan tidak dapat dianggap sebagai kebijakan politik bila tidak sesuai dengan apa yang telah dijelaskan oleh agama secara detail dan transparan.¹³²

Beliau menegaskan bahwa jika yang dimaksud dari pernyataan tersebut adalah bahwa setiap kebijakan politik dianggap sebagai tindakan yang tidak benar bila kontradiksi dengan nilai-nilai moralitas agama, maka pernyataan itu benar. Sebaliknya bila yang dimaksud dari pernyataan tersebut adalah bahwa setiap kebijakan politik tidak akan dianggap benar bila tidak sesuai dengan apa yang telah diuraikan oleh agama secara detail, terperinci dan transparan, maka pernyataan itu kurang tepat, karena tidak sesuai dengan fakta-fakta sejarah dimana sebagian besar sahabat Nabi telah melakukan kebijakan publik padahal tidak dijelaskan hukumnya secara terperinci dan transparan di dalam agama.¹³³ Sebagai contoh, proses penyatuan ayat-ayat Al-Qur'an dalam satu mushaf seperti yang dilakukan Abu Bakar. Ini menandakan bahwa setiap perilaku politik tetap dinilai sebagai hal yang aflikatif selama tidak melanggar nilai-nilai yang ada dalam agama.

Dari pandangan itulah salah satunya yang melatar belakangi mengapa berbagai negara Islam memiliki sistem kenegaraan yang berbeda-beda. Indonesia menganut sistem demokrasi berbeda dengan sistem negara Arab Saudi yang menganut sistem monarki dan begitu juga negara Islam lainnya

¹³² *Ibid.*, hal. 6

¹³³ *Ibid.*, hal. 7

yang memiliki sistem negara yang berbeda-beda. Namun yang terpenting sebagaimana disampaikan diatas bahwa setiap aktivitas politik hendaknya terbangun atas dasar moral dan nilai esensi agama seperti kejujuran, keadilan, amanah dan sebagainya.

Dengan begitu kegiatan politik yang terjadi akan damai dan berorientasi pada kemaslahatan orang banyak dan kemajuan negara, sehingga negara-negara yang mayoritas penduduknya muslim bisa memberikan contoh kepada negara yang mayoritas non muslim dalam pengelolaan negara. Namun sayangnya yang hari ini terjadi banyak negara Islam justru mengalami degradasi dalam pengelolaan negara, dan kesadaran masyarakat dalam bernegara, sehingga negara-negara Islam menjadi lebih tertinggal dari pada dengan negara-negara yang notabannya bukan negara islma, seperti yang berada di benua Eropa ataupun Amerika.

Kedua benua tersebut diisi oleh berbagai negara yang penduduk mayoritasnya non muslim, tetapi hari ini malah menjadi pusat percontohan, karena mereka berhasil membuktikan kemajuan dalam mengelola negara dibanding dengan negara-negara Islam lainnya. Oleh sebab itu dengan adanya pendidikan politik diharapkan Indonesia mampu memberikan kesadaran terhadap masyarakat dan juga politisi agar selalu berpegang teguh terhadap moralitas ajaran agama Islam, agar pelanggaran dan kecurangan yang selama ini terjadi dalam dunia politik bisa teratasi dan semakin tahun semakin berkurang.

Selain itu, jika PKB Trenggalek serius dalam menjalankan pendidikan politik bagi masyarakat juga akan menjadi salah satu cara dalam mengontrol

hal-hal yang dilarang agama maupun negara. Sebab masyarakat yang sadar akan politik akan berperan aktif dalam menyampaikan saran kepada pemangku kebijakan sehingga bisa menjadi kontrol para pemimpin daerah. Di Indonesia sebagai penganut demokrasi, lantaran politiklah seorang pemimpin ditentukan, dan dengan politik masyarakat bisa mempengaruhi kebijakan yang akan dibuat atau diterapkan oleh pemimpin.

Jika dipandang dari segi fiqih siyasah, yang terpenting mengenai pendidikan politik bagi masyarakat yang dilakukan oleh Partai Kebangkitan Bangsa di Kabupaten Trenggalek ini adalah membahas kegiatan politik yang baik. Definisi baik dalam ruang lingkup ini artinya tidak menyimpang dari ajaran Islam dan juga melanggar peraturan negara. Hal ini terdapat dasar yang kuat dari fakta sejarah dimana sebagian besar sahabat Nabi telah melakukan kebijakan publik padahal tidak dijelaskan hukumnya secara terperinci dan transparan di dalam agama.¹³⁴ Sebagai contoh, proses penyatuan ayat-ayat Al-Qur'an dalam satu mushaf seperti yang dilakukan Abu Bakar. Yang menjadi benang merahnya adalah hal tersebut tidak menyimpang dari ajaran Islam dan juga peraturan negara.

Abdurrahman Ibnu Khaldun dengan sederhana memberikan naratif bahwa perilaku politik seseorang tidak terlepas dari nilai-nilai etika dalam berpolitik diantaranya adalah :

- 1) Almalik Attabii yaitu perilaku politik seseorang pemimpin yang hanya berdasarkan intuisi semata. Jadi, semua bentuk perilaku yang dilakukan seseorang politisi dalam mencapai satu tujuan tidak terlepas

¹³⁴ *Ibid.*, hal. 8

dari pengaruh intuisi yang dimiliki, sehingga besar kemungkinan sangat otoriter dalam pengambilan sebuah keputusan. Oleh karena itu, Ibnu Khaldun memandang bagian ini sebagai perilaku yang tidak terpuji.

- 2) Almalik Assiyasi yaitu perilaku politik seorang pemimpin yang banyak dipengaruhi oleh akal dalam pengambilan sebuah keputusan sangat bergantung pada nilai rasionalisasi masalah. Bila perilaku tersebut dinilai rasional oleh publik maka akan signifikan dan dapat diterima. Sebaliknya jika tidak dinilai sebagai hal yang rasional akan dianggap deskruktif dan tidak dapat diterima. Namun dalam prakteknya, para ahli hukum tetap menilai bahwa perilaku politik semacam ini setidaknya tidak dapat memberi dampak positif pada setiap individu sebagai bagian dari komunitas masyarakat yang ada misalnya rasa keadilan, kedamaian dan ketenteraman hidup. Hanya saja, corak politik seperti ini masih dianggap tabu dan kurang produktif, karena hanya mementingkan sisi duniawi saja dan kurang memperhatikan nilai-nilai spiritual agama.
- 3) Perilaku politik seorang pemimpin yang tidak terlepas dari nilai moralitas agama. Segala aktivitas politik yang dilakukan seorang politisi, baik berupa terobosan baru atau upaya menarik empati masyarakat terkontaminasi oleh nilai yang ada sehingga kecil kemungkinan terjadi kecurangan. Selain itu keseimbangan antara

privasi yang diberikan kepada setiap individu untuk menyatakan aspirasi politiknya akan tetap sejalan dengan petunjuk agama.¹³⁵

Dari tiga poin diatas, Ibnu Khaldun menegaskan bahwa perilaku seorang politisi hendaknya masuk dalam nominasi yang ketiga, karena menurutnya bentuk tersebut menuntut keseimbangan antara integritas politik dengan nilai normatif agama. Maka setiap politisi yang mampu mengakselerasikan kedua poin tersebut akan dianggap berhasil. Sebaliknya bila tidak mampu maka gebrakan-gebrakan politiknya akan dianggap sebagai jargon belaka, bahkan tidak menutup kemungkinan mengalami impase.¹³⁶ Bagi umat Islam, mengangkat pemimpin merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan. Keberadaannya memiliki peran yang cukup fundamental dalam kehidupan umat. Syariat Islam tidak akan tegak secara kaffah kecuali di bawah perlindungan sebuah kepemimpinan. Karena dalam Islam, kita tidak hanya diperintahkan shalat, puasa, sedekah dan sebagainya yang bisa dilakukan secara individual.

Tentunya sebagai muslim sejati, semua pilihan itu akan kita ukur sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an dan Sunnah yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadistnya sebagai berikut :

Siapa saja yang melepaskan ketaatan, maka ia akan bertemu Allah pada hari kiamat tanpa memiliki hujjah. Dan siapa saja yang meninggal sedang di pundaknya tidak ada baiat, maka ia mati seperti mati jahiliyah (dalam keadaan berdosa). (HR. Muslim).¹³⁷

¹³⁵ *Ibid.*, hal. 7

¹³⁶ *Ibid.*, hal. 8

¹³⁷ <http://ravstaycool.blogspot.co.id/2014/04/golput-dalam-perspektif-islam-6.html>, diakses pada 3 Agustus 2021 pukul 17.33 WIB.

Dengan begitu salah satu point yang tidak boleh terlewat adalah jika PKB Trenggalek serius dalam melakukan pendidikan politik untuk kemajuan demokrasi dan sistem pemerintahan Indonesia dan khususnya yang ada di Trenggalek yaitu dengan cara memberikan contoh bahwa kader-kader PKB Trenggalek tidak melakukan hal-hal yang dilarang agama maupun negara dalam menjalankan misi politiknya. Menurut peneliti cara itu sebagai salah satu cara yang sangat efektif untuk kesuksesan pendidikan politik bagi masyarakat.

Sementara pembuktian lainnya bahwa kegiatan yang dilakukan Partai Kebangkitan Bangsa adalah sesuatu hal yang baik, yaitu banwasanya hal yang paling di kehendaki oleh PKB adalah sebuah karya kemajuan bangsa ini dengan memberikan kader-kader terbaik PKB untuk negeri ini, tolak ukur sebuah karya dalam hal ini adalah sebuah kemenangan menduduki kursi jabatan baik itu kursi jabatan DPRD ataupun kursi jabatan lainnya, karena dari situlah bisa merubah Indonesia menuju sebuah kemajuan.